

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Daftar Buku

Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003, Bandung, Citra Adtya Bhakti, 2003

Adrian Sutedi, 2009 *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta

A Masyur Effendi, 1994, *Hak Asasi Manusia, Dimensi Dinamika Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Asri Wijayanti, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Ed.1.Cet.2. Jakarta

Bambang sunggono, 2003, *Metode penelitian Hukum*, radja grafindo

Frans Magnis Suseno, 1999 *Etika politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Hukum*, Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta

Imam Soepomo, 1975, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya

Soemitro Dalam Soejono & Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum* : Rineka Cipta, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta

Tabrani abby, 2006, *Hukum Perburuhan/ Ketenagakerjaan Dalam Panduan Bantuan hukum di Indonesia*, Jakarta, YLBHI

Ugo , dkk, 2011, *Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Sinar Grafika, Jakarta

Y.W. Sunundhia Dan Ninik Widiyanti, 1998, *Masalah PHK Dan Pemogokan*, Bina Aksara, Jakarta

Zaeni asyhadie, 2008, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta, Rajawali Pers

## **B. INTERNET**

<http://sp3-tel.blogspot.co.id/2012/01/hak-normatif-sebagai-hak-dasar-buruh.html>,

di unduh tanggal 15 September

<http://kartonmedia.blogspot.co.id/2013/04/perbedaan-buruh-dan-karyawan-atau.html>, di unduh 16 september 2015

<http://dilihatya.com/1762/pengertian-tenaga-kerja-menurut-para-ahli>, di unduh 16 september 2015

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja Atau Buruh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Republik Indonesia No.KEP.232/MEN/2003 akibat hukum mogok kerja yang tidak sah.

